

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI DESA SUTRA KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**Irda Ella Mardiani
NIM. E42010072**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
E-mail :Ellairda@yahoo.co.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sutra Kecamatan sukadana Kabupaten Kayong Utara” penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program raskin di Desa Sutra belum terlaksana secara efektif. Beras miskin (raskin) adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan raskin pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun pada saat implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan seperti apa yang di harapkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor implementasi program raskin di Desa Sutra, penelitian ini di dasarkan pada teori Edward III dalam mengukur suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor- faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama, komunikasi yang masih kurang dalam bentuk sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai raskin masih minim. Faktor kedua, sumberdaya dalam hal ini masih kurangnya fasilitas di dalam implementasi program raskin yang mempengaruhi implementasi program raskin di Desa Sutra. Faktor ketiga, disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam implementasi program raskin yang menyebabkan kurang optimalnya dalam menjalankan implementasi program raskin. Faktor keempat, struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak yang menyebabkan implementasi program raskin yang membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan informan penelitian program raskin di Desa Sutra Kecamatan sukadana Implementasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Kata-kata kunci : implementasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

ABSTRACT

This thesis titled "Implementation Program Rice Poor (Raskin) Silk Village District of North Kayong District Sukadana" thesis is intended to describe and analyze the factors that cause Raskin program implementation in the village of Silk is not implemented effectively. Rice for the poor (Raskin) is a government program to help the poor and food so they get a poor rice for household needs. But at the time of implementation of the policy can not be run as what is expected, because there are several factors that affect the implementation delays. The purpose of this study was to determine how these factors Raskin program implementation Silk Village, this research is based on the theory of Edward II in measuring the implementation of public policy it is important to know the variables and factors that influence. The first factor, communication is still lacking in the form of socialization that causes people's understanding of the Raskin is still minimal. The second factor, the resources in this case is the lack of facilities in the implementation of programs that affect the implementation of the program Raskin Raskin Silk Village. The third factor, the disposition of which is the implement or attitude is lacking to support the implementation of programs that lead to less optimal Raskin in Raskin program implementation. The fourth factor, bureaucratic structure involving many parties that led to the implementation of Raskin program that takes a long time in the process of implementation. The results in this study is based on interview with informants research Raskin program in the Village District of Sukadana Implementation Sutra is not fit for purpose and do not run well in line with expectations.

Keywords: implementation, communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

A. PENDAHULUAN

Program Raskin adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi sehingga diharapkan semua pihak ikut mensukseskan program ini agar bisa dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa kemiskinan masih terdapat pada penduduk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam memecahkan masalah kemiskinan perlu dipahami sebab kemiskinan. Dasar hukum yang menjadi peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah Peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan

pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan Raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program, pada kenyataannya implementasi kebijakan raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada pedoman umum raskin. Sasaran dari Program Raskin ini memanglah untuk meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar – benar bisa merasakan manfaatnya yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan.

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Program Raskin di Desa Sutra Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana dengan baik?”

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidak berhasilan Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa sutra Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana dengan baik.

3. Manfaat Penelitian

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan mengenai program bantuan beras miskin (RASKIN). Dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menjadi bahan pengkajian dan pengembangan ilmu khususnya disiplin Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai solusi dan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah Desa Sutra, khususnya terkait dengan faktor – faktor yang menyebabkan Implementasi Program raskin di Desa Sutra Kecamatan Sukadana. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dilingkungan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

b. Faktor – Faktor Kebijakan

Model Edward III (1984:10) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*.

c. Konsep Implemenrasi

Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Berdasarkan serangkaian tersebut, peneliti dalam penelitian ini lebih mengarah kepada tahap implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan kembali kondisi nyata yang ada di lapangan (Sugiyono, 2007:23). Dari penelitian implementasi ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kebijakan dan pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan serta saran untuk pembuat kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama serta untuk menjadi pembelajaran untuk pembuatan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini menggunakan Analisa kualitatif, analisa kualitatif adalah bagaimana peneliti mengolah dan menganalisa data – data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk selanjutnya

dapat diinterpretasikan sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu,serta gubernur dan bupati/walikota seluruh indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Desa Sutra merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kayong Utara Kecamatan Sukadana yang melaksanakan program Raskin. Program raskin ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu atau miskin di desa Sutra dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk beras murah. Berdasarkan pengamatan itu telah disebutkan bahwa tujuan dari pendistribusian raskin ialah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama

rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

a. Komunikasi

Dari hasil penelitian mengenai faktor komunikasi pada implementasi program raskin yang ada di Desa Sutra, diketahui bahwa proses implementasi kebijakan raskin kurang melakukan sosialisasi kebijakan baik secara formal maupun informal. Sosialisasi yang terjadi tidak efektif jika dikaitkan dengan waktu sosialisasi yang jarang dilakukan oleh implementor. Adapun sosialisasi yang dilakukan hanya kepada antar ketua RT dan RW kemudian diberikan informasi mengenai raskin. Apabila sosialisasi yang dilakukan secara informal yang digunakan tidak didukung dengan sosialisasi formal maka sosialisasi yang dilakukan tidak dapat menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan secara utuh bahkan dapat memunculkan persepsi berbeda-beda di antara penerima informasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi program ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program raskin yang berkaitan dengan sumber daya. Dapat diambil kesimpulan dalam sumber daya

fasilitas dalam implementasi raskin di Desa Sutra masih sangat kurang memadai dalam pelaksanaan penyimpanan beras miskin yang mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga pelaksanaan program raskin tersebut masih belum berjalan dengan baik. Karena masih dibutuhkan fasilitas merupakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka untuk mempermudah keadaan agar keadaan fasilitas yang tidak memadai akan mempersulit implementor.

c. Disposisi

Disposisi implementor tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang dijalankan. Jika dilihat kembali dalam mengenai pengetahuan dan pemahaman implementor, telah mengetahui substansi dari kebijakan yang dijalankan. Tetapi dengan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan tidak cukup untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik. Karakteristik berupa komitmen tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan implementasi, hal ini ditujukan dengan tidak adanya komitmen dari implementor dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga muncul ketidakpedulian implementor terhadap masyarakat miskin yang tidak terdata.

d. Struktur Birokrasi

Program raskin di Desa Sutra yang terkait dalam bidang tugas

kegiatan yang melakukan program raskin sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak sehingga tidak mudah untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas. Pihak yang terlibat di bawah satu komando, hal itu relatif mudah untuk mengkoordinasikannya akan tetapi jika pihak-pihak yang terlibat masing-masing mempunyai garis komando sendiri ini akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan. Maka hal ini lah yang menjadi implementasi program raskin di Desa Sutra di mana dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah melibatkan banyak instansi/dinas yang masing-masing mempunyai atasan sendiri-sendiri.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Komunikasi Dalam implementasi program raskin di Desa Sutra masih mengalami kurangnya komunikasi yang dilakukan implementor. Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.
2. Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam

proses implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan.

3. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
4. struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut.

1. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pikiran-pikiran ke bentuk tulisan.
2. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dengan tema “ Implementasi

Program Beras Miskin (RASKIN) di Desa Sutra Kecamatan Sukadana ” masih dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan karena peneliti sendiri masih tergolong baru untuk melakukan penelitian ilmiah. Kelemahan tersebut khususnya pada keterbatasan dalam melakukan wawancara, teknik pengumpulan data dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

Arifin, Zaenal. 1998. *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Grasindo

Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua.

Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elek Media Komputindo

Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandu Remaja

Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia

Soetomo, 2009.

Pembangunan Masyarakat.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto Edi Ph.D. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta. 2009

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu

Politik Indonesia (AIPi) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad

Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Skripsi dan Tesis

Musawa, Mariyam. 2009. “*Studi Implementasi Program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan gajahmungkur, Kota Semarang*”. (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Anggoro, Tri. 2006/2007. “*Evaluasi Kebijakan Raskin*”. (Skripsi).

Undang – Undang :

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Petunjuk*

Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi kalimantan Barat

- Undang-Undang No. 32 tahun 2004.** tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1996.** Tentang Pangan.
- Undang-Undang No. 47 tahun 2009.** Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Presiden RI No. 13 tahun 2009** Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Intruksi Presiden No. 8 tahun 2008.** Tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002.** Tentang Ketahanan Pangan
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003.** Tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
- Keputusan Menko Kesra No. 35 tahun 2008.** Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- Buku Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010** dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : IRDA ELLA MARDIANI
NIM / Periode lulus : E42010072/ 2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : Ellairda@yahoo.co.id/ 081256352391

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SUTRA KECAMATAN
SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui 10/2/15
Pengelola Jurnal Prodi IP
H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 24 Januari 2015

(IRDA ELLA MARDIANI)